

PENGARUH THIN CAPITALIZATION, PERTUMBUHAN PENJUALAN, DAN TATA KELOLA PERUSAHAAN TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK PERUSAHAAN CONSUMER CYCLICALS YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2018-2022

Nurul Hafiza¹, Nini Sumarni²

¹ Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) Syech M. Djamil Djambek, nurulhafizaa10@gmail.com

² FFakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) Syech M. Djamil Djambek, ninisumarni@uinbukittinggi.ac.id

ABSTRACT

This research is based on the assumption that tax payments are detrimental to companies which will ultimately encourage tax avoidance practices. Where the biggest tax avoidance losses in Indonesia come from corporate taxpayers. Apart from that, there is a phenomenon of high levels of debt use in consumer cyclical companies, where this phenomenon of using debt is also found in the case of PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI). This research is intended to examine the impact of the variables thin capitalization, sales growth, and corporate governance on consumer cyclical company tax avoidance. The research applied is quantitative research that uses data sources in the form of secondary data. The sample collection method used purposive sampling which was carried out on consumer cyclical companies listed on the Indonesia Stock Exchange (BEI) in 2018-2022 with a population of 152 companies which resulted in 14 companies as samples. The total number of observations made was 70 observations. Multiple linear regression analysis is the analysis used in this research which is processed using SPSS program support. The findings from the test prove that thin capitalization, an independent board of commissioners, and an audit committee partially show no influence on tax avoidance. Meanwhile, partial sales growth shows a positive influence on tax avoidance. Simultaneously, the independent variables examined in this research show an influence on tax avoidance.

Keywords: Thin Capitalization; Sales Growth; Corporate Governance; Tax Avoidance

ABSTRAK

Penelitian ini didasari oleh adanya anggapan pembayaran pajak merugikan perusahaan yang pada akhirnya akan mendorong terjadinya praktik penghindaran pajak. Dimana kerugian penghindaran pajak

terbesar di Indonesia berasal dari wajib pajak badan. Selain itu adanya fenomena tingkat penggunaan utang yang tinggi pada perusahaan *consumer cyclicals*, dimana fenomena dengan memanfaatkan utang ini terdapat juga dalam kasus PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI). Riset ini dimaksudkan untuk menguji dampak variabel *thin capitalization*, pertumbuhan penjualan, tata kelola perusahaan pada penghindaran pajak perusahaan *consumer cyclicals*. Penelitian yang diterapkan merupakan penelitian kuantitatif yang menggunakan sumber data berupa data sekunder. Cara pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling* yang dilakukan pada perusahaan *consumer cyclicals* yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2018-2022 dengan populasi sebanyak 152 perusahaan yang menghasilkan 14 perusahaan sebagai sampel. Jumlah keseluruhan pengamatan yang dilakukan sebanyak 70 pengamatan. Analisis regresi linear berganda merupakan analisis yang digunakan dalam penelitian ini yang diproses menggunakan dukungan program SPSS. Temuan dari pengujian membuktikan *thin capitalization*, dewan komisaris independen, dan komite audit secara parsial tidak menunjukkan adanya pengaruh pada penghindaran pajak. Sementara itu, pertumbuhan penjualan secara parsial menunjukkan adanya pengaruh positif pada penghindaran pajak. Secara simultan variabel independen yang diteliti dalam penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh pada penghindaran pajak.

Kata Kunci: *Thin Capitalization*; Pertumbuhan Penjualan; Tata Kelola Perusahaan; Penghindaran Pajak

1. Pendahuluan

Pajak adalah iuran yang harus dibayarkan oleh wajib pajak pribadi atau badan, bersifat memaksa dan diikat oleh peraturan perundang-undangan, dengan tanpa adanya balas jasa langsung serta diperuntukkan oleh negara demi kesejahteraan rakyatnya, sebagaimana diatur di dalam UU No. 6 Tahun 1983 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang sudah pernah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir kali dengan UU No. 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (PP Republik Indonesia No. 50 Tahun 2022, 2022). Pajak sebagai penerimaan terbesar dapat dilihat dari data Badan Pusat Statistik dimana diperoleh hampir 80% penerimaan negara berasal dari penerimaan pajak dan 20% dari penerimaan lainnya (Badan Pusat Statistik, 2023).

Tabel 1. Penerimaan negara

Sumber Penerimaan Keuangan	(Dinyatakan dalam Milyaran (Rp)				
	2018	2019	2020	2021	2022
I. Penerimaan					
Pajak	151879	154614	128513	154784	192493
	0	2	6	1	8
Bukan Pajak	409320	408994	343814	458493	510930
Jumlah Penerimaan	192811	195513	162895	200633	243586
	0	6	1	4	7
II. Hibah	15565	5497	18833	5013	1011
Jumlah	194367	196063	164778	201134	243687
	5	4	3	7	8
Persentase(%)	78%	79%	78%	77%	79%
Penerimaan Pajak					

Sumber: Data diolah dari bps.go.id

Namun dengan adanya kewajiban pembayaran pajak menimbulkan kontra antara pemerintah dan perusahaan disebabkan oleh perbedaan tujuan masing-masing. Pemerintah mempunyai tujuan untuk memaksimalkan penerimaan negara melalui pajak sedangkan perusahaan memiliki tujuan untuk memperoleh laba yang maksimal. Karena hal tersebut mendorong perusahaan melakukan penghindaran pajak dengan mengurangi atau meminimalkan pembayaran pajak kepada negara melalui berbagai cara yang legal.

Penghindaran pajak ini tergolong tindakan yang tidak etis dilakukan, dengan memanfaatkan strategi penghindaran pajak yang legal demi tujuan memperkecil pajak yang harus dibayarkan. Berdasarkan penjelasan *Tax Justice Network* yang berjudul “*The state of tax justice 2020 : Tax Justice in the time of Covid-19*”, melaporkan kerugian yang berasal dari dampak penghindaran pajak kepada penerimaan negara Indonesia mencapai 4,86 miliar dollar amerika pertahun, yang setara dengan 68,7 triliun rupiah (dengan nilai tukar 14.149 rupiah). Dimana kerugian akibat penghindaran pajak ini didominasi wajib pajak badan dengan total kerugian 67,6 triliun rupiah, selebihnya bersumber dari wajib pajak pribadi sebanyak 1,1 triliun rupiah. (Fatimah, 2020).

Contoh kasus perusahaan yang melakukan penghindaran pajak adalah PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI), sebuah perusahaan pelayanan kesehatan yang terafiliasi di Singapura. Penghindaran pajak oleh PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) dijalankan dengan beragam cara, salah satunya dengan pemanfaatan utang melalui cara mengakui utang afiliasi sebagai modal (Unair News, 2022). Dilansir dari kontan.co.id, menurut laporan keuangan bulan Desember 2022 perusahaan yang mempunyai komposisi utang yang tinggi dibandingkan modal meliputi perusahaan sektor *consumer cyclicals*, *consumer non-cyclicals*, *basic materials*, *energy*, *infrastrukture*, dan *industry* yang condong mempunyai perbandingan utang atas modal yang terbilang tinggi diatas tiga kali (Soenarso, 2023). Pemanfaatan utang dengan mengkondisikan jumlah utang yang lebih tinggi dari modal dapat dikaitkan dengan tindakan penghindaran pajak seperti kasus PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI). Karena hal tersebut, peneliti tertarik meneliti penghindaran pajak pada sektor *consumer cyclicals* yang juga termasuk kedalam perusahaan dengan komposisi utang yang tinggi.

Tabel 2. Data peningkatan laba perusahaan

N o	Kode	Nama Perusahaan	Tahu n	Laba Sebelum Pajak Penghasilan (Rp)
1. MICE	Multi Indocitra Tbk.		2020	8.674.034.193
			2021	42.602.681.964
			2022	67.658.968.274
2. LPIN	Multi Prima Sejahtera Tbk		2020	8.395.696.968
			2021	25.483.321.670
			2022	31.770.915.490
3. INDS	Indospring Tbk.		2020	75.316.440.467

4. SMS	Selamat Sempurna Tbk.	2021	242.304.340.714
M		2022	297.078.323.642
5. AUTO	Astra Otoparts Tbk.	2020	684.268.000.000
		2021	922.168.000.000
		2022	1.172.002.000.000
6. TRIS	Trisula International Tbk.	2020	116.071.000.000
		2021	755.129.000.000
		2022	1.730.906.000.000
7. HRTA	Hartadinata Abadi Tbk.	2020	11.884.360.558
		2021	33.542.940.532
		2022	91.700.254.580
8. ERAA	Erajaya Swasembada Tbk	2020	218.204.833.971
		2021	248.165.327.819
		2022	326.183.131.521
9. MPM	Mitra Pinasthika Mustika Tbk.	2020	917.316.742.000
X		2021	1.495.064.863.000
		2022	1.497.339.515.000

Sumber: Laporan keuangan tahunan

Berdasarkan tabel 2 disajikan data mengenai beberapa perusahaan yang mengalami peningkatan laba pada sektor *consumer cyclical* selama tiga tahun terakhir tahun 2020-2022. Adanya peningkatan laba dapat mendorong perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak dengan memanfaatkan berbagai strategi penghindaran pajak yang legal. Dimana jumlah laba yang meningkat akan berpengaruh kepada peningkatan jumlah pajak akan dibayarkan.

Tindakan penghindaran pajak pada penelitian ini dipengaruhi oleh faktor-faktor diantaranya *thin capitalization*, pertumbuhan penjualan, dan tata kelola perusahaan. Pertama, *Thin capitalization* menggambarkan kombinasi modal perusahaan, dimana komposisi utang lebih tinggi dari pada modal (Danilla & Septiani, 2023). Penelitian sebelumnya oleh (Tarmizi & Perkasa, 2022) dan (Azhar & Windhy Puspitasari, 2023) membuktikan bahwa *thin capitalization* menunjukkan adanya pengaruh positif pada penghindaran pajak. Namun terdapat perbedaan dengan temuan sebelumnya oleh penelitian (Fathurrahman et al., 2021) yang membuktikan *thin capitalization* menunjukkan adanya pengaruh negatif signifikan pada penghindaran pajak.

Selanjutnya, faktor pertumbuhan penjualan, peningkatan penjualan dapat menggambarkan pengelolaan bisnis yang baik dan berdampak positif terhadap laba yang dihasilkan. Penelitian sebelumnya oleh (Khomsiyah et al., 2021) menyatakan bahwa pertumbuhan penjualan menunjukkan adanya pengaruh positif dan signifikan pada penghindaran pajak. Namun terdapat ketidaksesuaian temuan dengan penelitian sebelumnya oleh (Kusumawardani & Nur Hidayanti, 2023) yang menyatakan bahwa pertumbuhan penjualan menunjukkan adanya pengaruh negatif pada penghindaran pajak.

Terakhir, faktor tata kelola perusahaan, dikenal juga dengan istilah *corporate governance*. Tata kelola perusahaan yang teratur mampu memastikan kegiatan perusahaan berjalan mengikuti peraturan yang berlaku. Untuk menciptakan tata kelola perusahaan yang teratur dapat tercermin dalam pembentukan dewan komisaris independen dan komite

audit (Hasnati, 2022). Keberadaan dewan komisaris pada suatu perusahaan akan menciptakan pengawasan yang objektif, independen dan menjaga keseimbangan kepentingan para *stakeholder*. Partisipasi dewan komisaris independen memberikan manfaat yang besar bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan dapat mencegah kecurangan yang dilakukan manajer. Penelitian sebelumnya oleh (Kusumawardani & Nur Hidayanti, 2023) dan (Khomsiyah et al., 2021) membuktikan bahwa dewan komisaris independen menunjukkan adanya pengaruh negatif pada penghindaran pajak. Berbeda dengan temuan sebelumnya oleh penelitian (Masrurroch et al., 2021) yang menunjukkan dewan komisaris independen memiliki pengaruh positif pada penghindaran pajak.

Keberadaan komite audit dapat menciptakan kefektifan pengelolaan dan pelaporan keuangan perusahaan yang mendorong terciptanya laporan keuangan yang terpercaya. Keberadaaan komite audit dapat mengawasi dan meminimalisir terjadinya kecurangan dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan. Penelitian sebelumnya oleh (Hilmi et al., 2022) menunjukkan komite audit memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Namun terdapat perbedaan hasil temuan dengan penelitian sebelumnya oleh (Khomsiyah et al., 2021) yang mmbuktikan komite audit menunjukkan adnya pengaruh positif dan tidak signifikan pada penghindaran pajak.

Berdasarkan latarbelakang yang telah dijelaskan, penelitian ini berjudul “*Pengaruh Thin Capitalization, Pertumbuhan Penjualan, dan Tata Kelola Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan Consumer Cyclicals yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2022*”. Dengan maksud penelitian untuk mengetahui adanya pengaruh secara parsial dan simultan variabel independen terhadap variabel dependen yang diteliti.

2. Tinjauan Pustaka

2.1 Teori agensi

Teori agensi juga disebut dengan teori kontraktual, dimana terdapat kontrak atau perjanjian antara pemilik (*principal*) yang menyewa pihak lain (*agent*), serta pemberian wewenang oleh pemilik kepada agen untuk mengambilkan keputusan terkait suatu kegiatan dengan mengatasnamakan pemilik. Teori ini mengasumsikan bahwa *principal* dan agen memiliki perbedaan kepentingan tersendiri. Menurut Jensen dan meckling, masalah keagenan ini muncul karena adanya dorongan kepada *agent* untuk bertindak demi kesejahteraan *principal* (Wijaya & Rahayu, 2021). Selain itu, masalah keagenan ini juga disebabkan oleh terpisahnya fungsi pengambilan keputusan dari fungsi kepemilikan dalam suatu perusahaan. Dalam hubungan keagenan ini manajer selaku *agent* mempunyai akses secara leluasa terhadap data dan informasi yang ada diperusahaan dibandingkan pemilik selaku *principal*.

Adapun hubungan teori agensi dengan penghindaran pajak ini adalah pemilik menginginkan perusahaan memperoleh laba semaksimal mungkin sedangkan manajer menginginkan bonus yang tinggi dari laba yang diperoleh perusahaan tidak peduli berapun laba yang dihasilkan. Perbedaan kepentingan antara *principal* dan *agent* akan mendorong *agent* melakukan strategi untuk memperkecil kewajiban pajak melalui cara yang sah. Praktik ini dapat meningkatkan keuntungan pribadi mereka. Di sisi lain, umumnya *principal* atau pemilik perusahaan tidak mendukung adanya penghindaran pajak, karena akan berpengaruh kepada reputasi perusahaan dan dapat menimbulkan potensi masalah hukum.

2.2 Teori Syariah Enterprise

Menurut Husain, teori syariah enterprise merupakan suatu teori bisnis yang didalamnya sudah disatukan dengan nilai-nilai islam demi menciptakan suatu konsep teori yang transenden dan lebih manusiawi (Ashfahany et al., 2023). Dalam konsep teori syariah enterprise menjelaskan pertanggungjawaban perusahaan tidak hanya kepada Allah SWT sebagai pemangku kepentingan utama melain juga pertanggungjawaban kepada *Stakeholder*. Amanah dalam pembuatan laporan keuangan diberikan oleh perusahaan kepada pihak manajemen.

Dimana dalam konsep amanah tersebut, manajemen bertanggungjawab selama proses pembuatan laporan keuangan. Tanggung jawab yang diemban oleh pihak manajemen yang didasarkan pada teori syariah enterprise dapat menghindari tindakan kecurangan.

2.3 Pengembangan Hipotesis

Thin capitalization merupakan kombinasi modal perusahaan, dimana komposisi utang lebih tinggi dari pada modal. Dalam menjalankan suatu usaha pada dasarnya utang tidak boleh lebih tinggi dari modal (Darya, 2019). Perusahaan memanfaatkan komposisi utang terhadap modal yang tinggi untuk melakukan penghindaran pajak. Dampak dari utang yang tinggi akan mengakibatkan beban bunga yang tinggi, hal ini akan mengurangi pendapatan dalam perhitungan pajak dan berpengaruh pada menurunnya laba yang dikenakan pajak. Dimana semakin tinggi komposisi utang atas modal berpengaruh pada semakin tingginya penghindaran pajak. Hal tersebut didukung oleh penelitian (Tarmizi & Perkasa, 2022) dan (Azhar & Windhy Puspitasari, 2023) yang membuktikan *thin capitalization* menunjukkan adanya pengaruh positif pada penghindaran pajak.

H₁: *thin capitalization* menunjukkan adanya pengaruh positif terhadap upaya penghindaran pajak

Pertumbuhan penjualan menggambarkan mengenai hasil dari investasi masa lalu yang dapat menjadi tolak ukur perkembangan di masa depan (Tim Penulis Prodi Akuntansi UMM, 2022). Pertumbuhan penjualan positif suatu perusahaan dapat mendorong terjadinya praktik penghindaran pajak. Meningkatnya penjualan dapat menggambarkan peningkatan laba perusahaan. Peningkatan laba berpengaruh kepada meningkatnya kewajiban pajak yang dapat memaksa perusahaan bertindak untuk mengurangi kewajiban pajak. Dimana semakin tinggi pertumbuhan penjualan sejalan dengan semakin besar nya upaya untuk mengurangi kewajiban pembayaran pajak. Pernyataan tersebut sesuai dengan temuan oleh penelitian (Khomsiyah et al., 2021) yang membuktikan pertumbuhan

penjualan menunjukkan adanya pengaruh positif dan signifikan pada penghindaran pajak.

H₂: pertumbuhan penjualan menunjukkan adanya pengaruh positif terhadap upaya penghindaran pajak

Dewan komisaris independen adalah bagian dari komisaris yang tidak terkait dengan direksi, komisaris lainnya, atau pemilki mayoritas saham, tidak mempunyai ikatan bisnis ataupun faktor-faktor yang dapat berdampak pada kecakapannya dalam bertindak independen untuk tujuan perusahaan (Hasnati, 2022). Ditinjau dari prespektif keagenan, adanya komisaris independen ini dapat mengurangi benturan kepentingan antara *principal* dan *agent*. Sehingga tindakan penghindaran pajak suatu perusahaan akan berkurang. Dalam konsep teori syariah enterprise adanya dewan komisaris independen ini dapat memastikan amanah yang diberikan kepada pihak manajemen dijalankan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Pengawasan oleh dewan komisaris independen terhadap pihak manajemen akan berpengaruh pada tindakannya, dimana manajemen akan bertindak lebih berhati-hati dan lebih terbuka dalam pelaporan keuangan. Banyaknya dewan komisaris independen dapat berpengaruh pada semakin ketatnya pengawasan terhadap manajemen sehingga tindakan penghindaran pajak dapat berkurang. Pernyataan tersebut didukung oleh penelitian (Kusumawardani & Nur Hidayanti, 2023) dan (Khomsiyah et al., 2021) yang membuktikan dewan komisaris independen mempunyai pengaruh negatif pada penghindaran pajak.

H₃: dewan komisaris independen menunjukkan adanya pengaruh negatif terhadap upaya penghindaran pajak

Komite audit merupakan komite yang ditetapkan oleh dewan komisaris untuk mendukung pelaksanaan tanggung jawab dan perannya (Syofyan, 2021). Komite audit dalam menjalankan tugasnya dapat menjadi penengah antara manajemen dan auditor eksternal. Selain itu, dalam fungsi pengawasan juga berperan menjadi perantara antar dewan

komisaris dan auditor internal. Selaku bagian yang melaksanakan pengawasan terhadap strategi keuangan, akuntansi, pengaturan internal, serta pelaksanaan *internal audit* dan *exsternal audit*, komite audit harus dapat mempertahankan independensinya. Dengan adanya komite audit dapat melakukan pengawasan terhadap sistem pelaporan keuangan sehingga mencegah pihak manajemen melakukan kecurangan dan mengurangi terjadinya penghindaran pajak. Sejalan dengan teori syariah enterprise komite audit dapat memastikan pihak manajemen bertindak dan bertanggung jawab sesuai dengan amanah yang diberikan kepadanya. Dimana semakin banyak komite audit, semakin sedikit terjadinya penghindaran pajak. Pernyataan tersebut sesuai dengan temuan oleh penelitian (Hilmi et al., 2022) yang membuktikan komite audit menunjukkan adanya pengaruh negatif pada penghindaran pajak.

H₄: komite audit menunjukkan adanya pengaruh negatif terhadap upaya penghindaran pajak.

Menurut Dyring, penghindaran pajak mencakup semua perbuatan yang dapat berpengaruh kepada kewajiban pajak, baik itu tindakan yang legal menurut peraturan pajak maupun tindakan khusus untuk mengurangi pembayaran pajak (Suleman, 2020). Tindakan penghindaran pajak pada penelitian ini dipengaruhi oleh faktor faktor diantaranya *thin capitalization*, pertumbuhan penjualan, dan tata kelola perusahaan (dewan komisaris independen dan komite audit). Selain melakukan pengujian pengaruh secara parsial penelitian ini juga melakukan pengujian pengaruh secara simultan. Dimana variabel independen yang diteliti akan diuji pengaruhnya secara simultan terhadap penghindaran pajak.

H₅: *thin capitalization*, pertumbuhan penjualan, dewan komisaris independen,dan komite audit secara simultan menunjukkan adanya pengaruh terhadap praktik penghindaran pajak.

3. Metode Penelitian

Penelitian yang diterapkan merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan sumber data berupa data sekunder. Data sekunder penelitian ini bersumber dari laporan keuangan tahunan perusahaan *consumer cyclicals* diperoleh dari website Bursa Efek Indonesia dan website perusahaan yang bersangkutan tahun 2018-2022. Berdasarkan kriteria pemilihan sampel yaitu *purposive sampling* yang dilakukan pada perusahaan *consumer cyclicals* dengan populasi sebanyak 152 perusahaan, sehingga menghasilkan 14 perusahaan sebagai sampel. jumlah keseluruhan pengamatan sebanyak 70 pengamatan. Kriteria *purposive sampling* mencakup perusahaan sektor *consumer cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2018-2022, sudah terdaftar sebelum periode tersebut, mengalami keuntungan (laba) yang selama periode tersebut, serta memiliki data yang relevan dan sesuai dengan variabel-variabel yang diteliti.

Variabel terikat yang diteliti yaitu penghindaran pajak. **Penghindaran pajak** mencakup semua perbuatan yang dapat berpengaruh kepada kewajiban pajak, baik itu tindakan yang legal menurut peraturan pajak maupun tindakan khusus untuk mengurangi pembayaran pajak (Suleman, 2020).

Pertumbuhan penjualan menggambarkan mengenai hasil dari investasi masa lalu yang dapat menjadi tolak ukur perkembangan di masa depan (Tim Penulis Prodi Akuntansi UMM, 2022).

Dewan komisaris independen adalah bagian dari komisaris yang tidak terkait dengan direksi, komisaris lainnya, atau pemiliki mayoritas saham, tidak mempunyai ikatan bisnis ataupun faktor-faktor yang dapat berdampak pada kecakapannya dalam bertindak independen untuk tujuan perusahaan (Hasnati, 2022).

Komite audit merupakan komite yang ditetapkan oleh dewan komisaris untuk mendukung pelaksanaan tanggung jawab dan perannya (Syofyan, 2021).

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Statistik Deskriptif

Tabel 3. Statistik deskriptif

	(N)	Minimu m	Maximu m	Mean	Std. Deviation
Thin_Capitalization	70	-2.66	.59	- .8051	.78895
Pertumbuhan_Penjual an	70	.00	1.49	1.246 4	.16839
Dewan_Komisaris_Ind ependen	70	-1.61	-.40	- .9575	.24835
Komite_Audit	70	.69	1.39	1.085 3	.09038
Penghindaran_Pajak	70	-3.22	1.04	- 1.312 6	.82274
Valid N (listwise)	70				

Sumber: Transformasi Data Sekunder yang diproses dengan Aplikasi SPSS 24 (2024)

Berdasarkan hasil yang terdapat dalam tabel 3 analisis statistik deskriptif dengan jumlah data (N) sebanyak 70 data menunjukkan penyebaran data masing-masing variabel penelitian yang bervariasi. Dimana variabel *thin capitalization*, dewan komisaris independen, dan penghindaran pajak menunjukkan penyebaran data yang terbilang besar dilihat dari nilai *mean* yang lebih kecil dibandingkan nilai *standard deviation*. Sementara itu, variabel pertumbuhan penjualan dan komite audit menunjukkan penyebaran data yang terbilang kecil dilihat dari nilai *standard deviation* yang lebih kecil dibandingkan nilai *mean*.

Analisis persamaan regresi liner berganda diatas sebagai berikut:

- Nilai konstanta sebesar -3,535 menjelaskan variabel penghindaran pajak sebesar -3,535 jika variabel independen yang diteliti sama dengan nol.
- Angka variabel *thin capitalization* (X1) sebesar 0,163 artinya jika *thin capitalization* naik 1 satuan akan diikuti oleh meningkatnya penghindaran pajak sebesar 0,163 dengan kondisi variabel independen selain *thin capitalization* bernilai konstan.

3. Angka variabel pertumbuhan penjualan (X2) sebesar 1,725 artinya jika pertumbuhan penjualan naik satu satuan diikuti oleh meningkatnya penghindaran pajak sebesar 1,725 dengan kondisi variabel independen selain pertumbuhan penjualan bernilai konstan.
4. Angka variabel dewan komisaris independen (X3) sebesar -0,242 menjelaskan jika dewan komisaris independen naik 1 satuan akan diikuti oleh menurunnya penghindaran pajak sebesar 0,242 dengan kondisi variabel independen selain dewan komisaris independen bernilai konstan.
5. Angka variabel komite audit (X4) sebesar -0,025 menjelaskan jika komite audit naik 1 satuan akan diikuti oleh menurunnya penghindaran pajak 0,025 dengan kondisi variabel independen selain komite audit bernilai konstan.

4.4 Pengujian Hipotesis

4.4.1 Uji t

Berdasarkan hasil yang terdapat dalam tabel 8 dapat diambil kesimpulan mengenai pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen yang diteliti pada penelitian ini, variabel dianggap memiliki pengaruh dengan syarat nilai t hitung $> t$ tabel atau $-t$ hitung $< -t$ tabel. Nilai t tabel dalam penelitian ini sebesar 1,66864. Dari keempat variabel independen, variabel yang menunjukkan adanya pengaruh positif terhadap variabel dependen hanyalah variabel pertumbuhan penjualan dibuktikan dengan nilai t hitung sebesar 3,018 $> 1,66864$ yang berarti H2 diterima sedangkan Ho ditolak. Sedangkan variabel independen lainnya (*thin capitalization*, dewan komisaris independen dan komite audit) tidak menunjukkan adanya pengaruh terhadap variabel dependen hal ini dibuktikan dengan nilai t hitung *thin capitalization* sebesar 1,336 $< 1,66864$ yang berarti H1 ditolak sedangkan Ho diterima. Nilai t hitung dewan komisaris independen sebesar -0,629 $> -1,66864$ yang berarti H3 ditolak sedangkan Ho diterima. Nilai t hitung komite audit sebesar -0,024 $> -1,66864$ yang berarti H4 ditolak sedangkan Ho diterima.

4.4.2 Uji F

Tabel 9. Uji F

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	6.353	4	1.588	2.558 .047 ^b
	Residual	40.353	65	.621	
	Total	46.706	69		

Sumber: Transformasi Data Sekunder yang diproses dengan Aplikasi SPSS 24 (2024)

Berdasarkan hasil yang didapat dalam tabel 9 dapat disimpulkan bahwa variabel independen yang diteliti menunjukkan adanya pengaruh secara simultan terhadap variabel dependen dengan nilai F hitung > F tabel yaitu 2,558 > 2,513 berarti H5 diterima sedangkan Ho ditolak.

4.4.3 Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R²)

Tabel 10. Uji koefisien determinasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.369 ^a	.136	.083	.78792	2.136

Sumber: Transformasi Data Sekunder yang diproses dengan Aplikasi SPSS 24 (2024)

Berdasarkan tabel 10 dapat diambil kesimpulan bahwa kemampuan variabel independen dalam mempengaruhi variabel dependen hanya sebesar 0,083 atau 8,3% yang dilihat dari nilai Adjusted R Square. Sementara itu sebesar 91,7% diungkapkan oleh faktor-faktor lainnya yang tidak dikaji pada penelitian ini.

4.5 Pembahasan

4.5.1 Pengaruh secara parsial thin capitalization terhadap penghindaran pajak

Pengujian hipotesis membuktikan *thin capitalization* tidak menunjukkan adanya berpengaruh. Temuan ini tidak sesuai dengan temuan sebelumnya oleh penelitian (Tarmizi & Perkasa, 2022) dan (Azhar

& Windhy Puspitasari, 2023). Penggunaan pendanaan dari utang menghasilkan biaya bunga yang bisa menurunkan keuntungan perusahaan, sehingga mengakibatkan berkurangnya kewajiban pajak. Tidak adanya pengaruh thin capitalization terhadap penghindaran pajak pada riset ini, karena mayoritas perusahaan yang menjadi sampel pada penelitian ini menggunakan pendanaan bukan dari utang kepada pihak ketiga melainkan dari pemegang saham atau pihak terkait lainnya. Dalam perhitungan pajak, beban bunga yang berasal dari pihak ketiga yang tidak ada hubungannya dapat mengurangi laba perusahaan yang dikenakan pajak. Hasil pengujian ini tidak mendukung teori agensi yang mengasumsikan manajer akan memaksimalkan beban bunga untuk mengurangi pembayaran pajak tidak terbukti. Temuan ini sejalan dengan temuan sebelumnya oleh (Danilla & Septiani, 2023) yang menunjukkan *thin capitalization* tidak memiliki pengaruh pada penghindaran pajak.

4.5.2 Pengaruh secara parsial pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak

Pengujian hipotesis membuktikan bahwa pertumbuhan penjualan secara parsial menunjukkan adanya pengaruh positif. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh (Khomsiyah et al., 2021). Pertumbuhan penjualan positif dapat berpengaruh pada meningkatnya laba yang dihasilkan oleh perusahaan. Setiap perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya pasti menginginkan laba yang besar. Akan tetapi dengan adanya kewajiban pembayaran pajak dapat mengurangi perolehan laba tersebut. Pertumbuhan penjualan positif atau meningkat dapat mendorong tindakan manajer dalam melakukan tindakan penghindaran pajak, hal tersebut didasarkan pada asumsi teori agensi. Tindakan penghindaran pajak tersebut bertujuan untuk memaksimalkan perolehan laba perusahaan dan untuk memaksimalkan keuntungan *principal* dan *agent*. Dimana semakin tinggi pertumbuhan penjualan, maka semakin besar juga terjadinya tindakan penghindaran pajak oleh perusahaan. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh (Kusumawardani & Nur Hidayanti, 2023) yang membuktikan

pertumbuhan pertumbuhan penjualan menunjukkan adanya pengaruh negatif pada penghindaran pajak.

4.5.3 Pengaruh secara parsial dewan komisaris independen terhadap penghindaran pajak

Pengujian hipotesis membuktikan dewan komisaris independen secara parsial tidak menunjukkan adanya pengaruh. Hal tersebut tidak sejalan dengan temuan sebelumnya oleh penelitian (Kusumawardani & Nur Hidayanti, 2023) dan (Khomsiyah et al., 2021). Dewan komisaris independen berperan dalam meminimalkan terjadinya benturan keinginan antar *principal* dan *agent* sehingga terjadinya penghindaran pajak dapat dicegah. Namun hasil temuan tidak dapat mendukung hal tersebut, karena hasil temuan tidak menunjukkan adanya pengaruh dewan komisaris independen pada penghindaran pajak. Sehingga asumsi agensi teori yang menjelaskan dengan adanya keberadaan dewan komisaris independen tindakan yang diambil oleh pihak manajemen dapat diawasi terutama dalam praktik penghindaran pajak tidak dapat dibuktikan. Selain itu ditinjau dari konsep syariah enterprise adanya dewan komisaris independen tidak bisa membuktikan terlaksana atau tidaknya amanah yang diberikan kepada pihak manajemen. Hal ini sejalan dengan temuan sebelumnya oleh penelitian (Yulianty et al., 2021) membuktikan dewan komisaris independen menunjukkan tidak adanya pengaruh pada penghindaran pajak.

4.5.4 Pengaruh secara parsial komite audit terhadap penghindaran pajak

Pengujian hipotesis membuktikan komite audit secara parsial tidak menunjukkan adanya pengaruh. Hasil tersebut tidak sesuai dengan temuan sebelumnya oleh (Hilmi et al., 2022). Keberadaan komite audit dapat mengawasi terjadinya kecurangan yang dilakukan manajer dalam upaya mengurangi kewajiban pajak. Namun temuan tersebut tidak dapat mendukung, disebakan oleh hasil penelitian tidak dapat membuktikan keberadaan komite audit berpengaruh pada penghindaran pajak. Sehingga teori agensi yang mengasumsikan dengan adanya komite audit mampu mengawasi pelaporan keuangan yang dibuat oleh pihak

manajemen sesuai dengan aturan tidak dapat dibuktikan. Selain itu ditinjau dari konsep syariah enterprise adanya komite audit tidak bisa membuktikan terlaksana atau tidaknya amanah yang diberikan kepada pihak manajemen. Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh (Yulianty et al., 2021) dan (Fathurrahman et al., 2021) yang menunjukkan komite audit tidak memiliki pengaruh pada penghindaran pajak.

4.5.5 Pengaruh secara simultan thin capitalization, pertumbuhan penjualan, dewan komisaris independen, dan komite audit terhadap penghindaran pajak

Pengujian hipotesis menunjukkan bahwa variabel independen yang diteliti dalam penelitian ini secara simultan mempunyai pengaruh pada penghindaran pajak. Maksud dari pengaruh variabel independen pada penghindaran pajak menjelaskan ketika *thin capitalization*, pertumbuhan penjualan, dewan komisaris independen, dan komite meningkat maka akan berdampak pada meningkatnya kewajiban pajak. kondisi tersebut mendorong tindakan manajer untuk melakukan upaya mengurangi kewajiban pajak perusahaan

5. Simpulan

5.1 Kesimpulan

Temuan analisis membuktikan bahwa *thin capitalization*, dewan komisaris independen, dan komite audit menunjukkan adanya pengaruh secara parsial terhadap penghindaran pajak. Sementara itu, pertumbuhan penjualan menunjukkan adanya pengaruh positif secara parsial terhadap penghindaran pajak. Secara simultan variabel independen yang diteliti menujukkan adanya pengaruh terhadap variabel dependen.

References

- Ashfahany, A. El, Ma'ruf, A., Saputro, E. P., Nasir, M., Setyowati, E., Rosyadi, I., Achmad, N., Trisnawati, R., Mangifera, L., Mujiyati, Wardana, C. K., Kurniawati, L., Waskito, J., Soepatini, Witono, B., Praswati, A. N., & Adawiyah, R. A. Al. (2023). *Ekonomi dan Bisnis*

Islam. Penerbit PT Sada Kurnia Pustaka.

Azhar, M. F., & Windhy Puspitasari. (2023). Pengaruh Thin Capitalization, Ukuran Perusahaan, Pertumbuhan Penjualan dan Umur Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 3(1), 1955–1966. <https://doi.org/10.25105/jet.v3i1.16332>

Badan Pusat Statistik. (2023). *Realisasi Pendapatan Negara.* Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id/indicator/13/1070/1/realisasi-pendapatan-negara.html>

Danilla, C., & Septiani, D. (2023). Pengaruh Thin Capitalization, Ukuran Perusahaan Dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Riset Akuntansi*, 15(1), 84–95.

Darya, I. G. P. (2019). *Akuntansi Manajemen.* Uwais Inspirasi Indonesia.

Fathurrahman, Andriyanto, W. A., & Sari, R. . D. P. (2021). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Komite Audit, dan Thin Capitalization terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akunida*, 7(2), 205–216.

Fatimah. (2020). *Dampak Penghindaran Pajak Indonesia Diperkirakan Rugi Rp 68,7 Triliun.* pajakku. <https://www.pajakku.com/read/5fbf28b52ef363407e21ea80/Dampak-Penghindaran-Pajak-Indonesia-Diperkirakan-Rugi-Rp-687-Triliun>

Hasnati. (2022). *Komisaris Independen & Komite Audit Organ Perusahaan yang Berperan Untuk Mewujudkan Good Corporate Governance di Indonesia.* Absolute Media.

Hilmi, M. F., Amalia, S. N., Amry, Z., & Setiawati, S. (2022). Pengaruh Dewan Komisaris Independen , Komite Audit , Leverage dan Intensitas Modal Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 6(4), 3533–3540. <https://doi.org/https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1178>

Ismanto, H., & Pebruary, S. (2021). *Aplikasi SPSS dan Eviews dalam Analisis Data Penelitian.* Penerbit Deepublish.

Khomsiyah, N., Muttaqin, N., & Katias, P. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Tata Kelola Perusahaan, Leverage, Ukuran Perusahaan, dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di BEI Periode 2014-2018. *Jurnal Ecopreneur*.12, 4(1), 1–19. <https://doi.org/10.51804/econ12.v4i1.917>

Kusumawardani, F., & Nur Hidayanti, A. (2023). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen, Komite Audit, Intensitas Modal, dan Pertumbuhan Penjualan terhadap Penghindaran Pajak. *Riset Ekonomi, Akuntansi dan Perpajakan*, 4(2), 2721–4109. <https://doi.org/10.30812/rekan.v4i2.3247>

Masrurroch, L. R., Nurlaela, S., & Fajri, R. N. (2021). Pengaruh profitabilitas, komisaris independen, leverage, ukuran perusahaan dan intensitas modal terhadap tax avoidance. *Inovasi*, 17(1), 82–93. <http://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/INOVASI>

PP Republik Indonesia No. 50 Tahun 2022, Pub. L. No. 50, 1 (2022).

Soenarso, S. A. (2023). *Sejumlah Emiten Miliki DER Tinggi, Begini Rekomendasi Sahamnya*. Kontan. <https://investasi.kontan.co.id/news/sejumlah-emiten-miliki-der-tinggi-begini-rekomendasi-sahamnya>

Suleman, N. (2020). *Perilaku Penghindaran Pajak*. Cahaya Arsh Publisher.

Syofyan, E. (2021). *Good Corporate Governance*. Unisma Press.

Tarmizi, A., & Perkasa, H. (2022). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Keluarga, dan Thin Capitalization terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, 1(2), 112–122.

Tim Penulis Prodi Akuntansi UMM. (2022). *Dimensi Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tax Avoidance*. Universitas Muhammadiyah Malang.

Unair News. (2022). *Kecenderungan Perusahaan Melakukan Penghindaran Pajak: Berpengaruh Terhadap Keterbacaan Laporan Keuangan yang Rendah?* Unair News. <https://news.unair.ac.id/2022/01/28/kecenderungan-perusahaan-melakukan-penghindaran-pajak-berpengaruh-terhadap-keterbacaan-laporan-keuangan-yang-rendah-2/?lang=id>

Wijaya, S., & Rahayu, F. D. (2021). *Penghindaran pajak*. Guepedia.

Yulianty, A., Ermania Khrisnatika, M., & Firmansyah, A. (2021). Penghindaran Pajak pada Perusahaan Pertambangan di Indonesia: Profitabilitas, Tata Kelola Perusahaan, Intensitas Persediaan, Leverage. *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)*, 5(1), 20–31. <https://doi.org/10.31092/jpi.v5i1.1201>